



# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

## BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



# e-PAYMENT



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2018

## KATA PENGANTAR

***Bismillahirrohmanirrohim***

***Assalamualaikum Wr, Wb,***

Puji Syukur kita kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan tuntunan dan berkah serta rahmatNya kepada kita semua. Pada akhir tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dalam laporan ini tersedia informasi yang relevan mengenai pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar selama tahun 2018.

Penyampaian LKjIP ini merupakan salah satu upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Perundang-undangan mengenai penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas Dinas/Instansi Pemerintah melalui penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud pertanggung jawaban pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan di susun dengan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

***Wassalamualaikum Wr, Wb***

**Bangkinang, Februari 2019**



**BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR**

**EDWARD, S.E. M.M.**

**Pembina**

**NIP. 19740326 20003 1 003**

## **IKTISAR EKSEKUTIF**

Berdasarkan Misi Kabupaten Kampar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Misi ke 1 (satu) yaitu *Menyiapkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan professional serta memiliki kompetensi tinggi, religius, beriman dan bertaqwa.* Sebagaimana ditetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kampar Periode 2017 – 2022, dengan rincian sasaran yaitu :

1. Meningkatkan SDM Aparatur BPKAD yang berkualitas, berintegritas, Bertanggung jawab dan memiliki wawasan serta keterampilan dalam pelaksanaan TUPOKSI yang sesuai dengan tuntutan Peraturan yang berlaku;
2. Meningkatnya Penggunaan Anggaran yang efektif dan efisien serta terkelolanya Aset Daerah yang berorientasi pada Kepentingan Publik;

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>IKTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1</b> <b>Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2</b> <b>Tugas, Fungsi dan Sumber Daya Manusia</b> .....	<b>2</b>
<b>1.2.1</b> <b>Tugas Pokok</b> .....	<b>3</b>
<b>1.2.2</b> <b>Fungsi</b> .....	<b>3</b>
<b>1.2</b> <b>Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b> .....	<b>4</b>
<b>1.3</b> <b>Sistematika Pelaporan</b> .....	<b>5</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>6</b>
<b>2.1</b> <b>Visi Dan Misi</b> .....	<b>6</b>
<b>2.1.1</b> <b>Visi</b> .....	<b>6</b>
<b>2.1.2</b> <b>Misi</b> .....	<b>7</b>
<b>2.2</b> <b>Tujuan</b> .....	<b>10</b>
<b>2.3</b> <b>Sasaran</b> .....	<b>10</b>
<b>2.4</b> <b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b> .....	<b>10</b>
<b>2.5</b> <b>Kebijakan, Program dan Sasaran</b> .....	<b>12</b>
<b>2.6</b> <b>Rencana Kerja Tahunan</b> .....	<b>12</b>
<b>2.7</b> <b>Perjanjian Kinerja Tahun 2018</b> .....	<b>16</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>20</b>
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</b> .....	<b>20</b>
<b>3.1</b> <b>Pengukuran Kinerja</b> .....	<b>20</b>
<b>3.2</b> <b>Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)</b> .....	<b>20</b>
<b>3.3</b> <b>Evaluasi dan Analisis Kinerja</b> .....	<b>21</b>
<b>B. REALISASI ANGGARAN</b> .....	<b>22</b>
<b>Analisis Capaian Keuangan</b> .....	<b>24</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>28</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1: Sasaran dan Indikator Kinerja Utama.....</b>	<b>11</b>
<b>Tabel 2 : RENCANA KERJA TAHUNAN 2018.....</b>	<b>12</b>
<b>Tabel 3: Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....</b>	<b>16</b>
<b>Tabel 4: Indikator Kinerja Utama (IKU).....</b>	<b>20</b>
<b>Tabel 5 : Capaian IKU 1 Tahun 2018 .....</b>	<b>21</b>
<b>Tabel 6: Jumlah Target dan Realisasi Peserta Pelatihan dan BIMTEK 2018 .</b>	<b>22</b>
<b>Tabel 7: Capaian IKU 2 Tahun 2018 .....</b>	<b>21</b>
<b>Tabel 8: Capaian IKU 3 Tahun 2018 .....</b>	<b>22</b>
<b>Tabel 9: Pagu dan Realisasi Keuangan Belanja Langsung T.A 2018 .....</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 10: Perubahan Anggaran dari APBD Murni dan APBD Perubahan .....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 12: Program dan Kegiatan Realisasi Keuangan Dibawah 90% .....</b>	<b>26</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1: Perjanjian Kinerja Perubahan TA. 2018..... 116**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan harapan Bangsa Indonesia karena merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Salah satu asas penyelenggaraan negara yang baik adalah asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dengan penyempurnaan tersebut, instansi pemerintah akan membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. LKjIP BPKAD Tahun 2018 juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja BPKAD di tahun yang akan datang.

## **1.2 Tugas, Fungsi dan Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Dan Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kampar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Data.
3. Bidang Anggaran terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
  - b. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran.
4. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran;
  - b. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pembukuan dan Akuntansi;
  - b. Sub Bidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Inventarisasi Aset dan Perencanaan Kebutuhan;
  - b. Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan;
  - c. Sub Bidang Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Daerah.

### **1.2.1. Tugas Pokok**

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan pengelolaan Keuangan, dan aset daerah memiliki Tugas Pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah, dengan rincian tugas pokok sebagai berikut:

1. Memimpin seluruh kegiatan Badan, baik secara administrasi maupun operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar.
2. Menkoordinasikan seluruh kegiatan baik intern maupun ekstern.
3. Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar.
4. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD serta mengendalikan pelaksanaan anggaran.
5. Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam bidang ketata usahan, keuangan, aset, perencanaan program.
6. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan pelaksanaan tugas dinas kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta.
7. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset serta program kerja daerah.
8. Membina dan memotivasi serta membimbing bawahan dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja.
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati..

### **1.2.2 Fungsi**

- 1 Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- 2 Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 3 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional;
- 4 Pembinaan administrasi perkantoran;

- 5 Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pengelolaan keuangan dan aset serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas;
- 6 Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;
- 7 Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- 8 Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

### **1.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi**

Sebagaimana diuraikan pada Bab ini bahwa Tugas Pokok BPKAD adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Permasalahan yang dihadapi dalam ruang lingkup pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
  1. Terbatasnya staf yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, magang maupun pendidikan formal maupun yang berlatar belakang pendidikan formal dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
  2. Terbatasnya Staf BPKAD yang menguasai teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tupoksi BPKAD
2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  1. Terbatasnya pemeliharaan program Aplikasi SIPKD secara kontinyu
  2. Sebagian besar aset daerah belum diinventarisir
  3. Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah.
3. Opini BPK Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar
  1. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan hasil temuan BPK.

#### **1.4 Sistematika Pelaporan**

Laporan kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) ini terdiri dari :

##### **BAB I PENDAHULUAN:**

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi dan menguraikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar, lingkungan strategis yang berpengaruh dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA:**

Pada Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjianjian Kinerja tahun yang bersangkutan, penetapan sasaran, program, kegiatan, target kinerja dan rencana kinerja tahun 2018 serta pencapaian sasaran.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada Bab ini menguraikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran atau pengukuran kinerja, analisa capaian kinerja, evaluasi kinerja serta hambatan/kendala dalam pencapaian tujuan.

##### **BAB VI PENUTUP :**

Pada Bab ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

##### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Visi Dan Misi**

#### **2.1.1 Visi**

Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan organisasi. Visi memberikan jiwa kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif.

Mengacu pada konsepsi visi diatas dan mengacu kepada Visi pembangunan Kabupaten Kampar, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah perlu menetapkan visi yang selaras dengan keadaan lingkungan serta perubahan-perubahan yang ada, dan selaras dengan visi induk organisasinya, yaitu:

**“Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel, Professional dan terkendali secara berkelanjutan Tahun 2022”.**

Pernyataan visi di atas memuat kata-kata kunci, yaitu peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang profesional. Kapasitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar dalam mengelola pengelolaan keuangan dinilai berhasil apabila mampu mewujudkan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara Optimal, Profesional dan Terkendali secara Berkelanjutan

Selanjutnya eksistensi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar dapat dipertahankan apabila masih ada kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Agar tetap memperoleh kepercayaan masyarakat, perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset. Untuk itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar beserta seluruh aparaturnya harus memiliki integritas profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, mulai dari perencanaan, penetapan, dan pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, dan penggunaan sistem informasi Teknologi Informasi.

**Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Yang Berkualitas** apabila dalam pelaksanaannya BPKAD didukung oleh Sumber Daya Manusia yang professional, hal ini sejalan dengan Tujuan Bupati Kampar dalam meningkatkan Kualitas SDM melalui pengembangan budaya kerja, aparatur yang professional, bersih dan beretika dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan serta sistem informasi manajemen Kepegawaian yang transparan dan akuntabel.

**Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang Transparan**, dalam pelaksanaan BPKAD menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan prinsip keadilan. Dalam hal ini pengelolaan keuangan harus dilakukan atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

**Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel dan Terkendali secara berkelanjutan** yakni dalam pelaksanaan Kerjanya BPKAD mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic dan berkelanjutan.

### **1.1.2 Misi**

Terwujudnya visi yang telah ditetapkan tersebut merupakan tantangan bagi seluruh komponen di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar. Sebagai penjabaran dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diamanatkan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar merumuskan konsepsi tugas yang harus diemban, yaitu berupa rumusan/pernyataan misi. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan memahami keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan,

dalam hal ini Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar yakni:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) aparat yang professional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu.
3. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Mewujudkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan terkendali secara berkelanjutan

Keempat Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misi 1 : **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) aparat yang professional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.**

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, SDM aparat BPKAD menjadi sangat penting dan merupakan kunci keberhasilan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sangat tergantung pada kemampuan aparatur yang bersifat intersektoral dan berfikir komprehensif. Peningkatan kualitas SDM merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasinya. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki moral, beriman, bertaqwa, berkualitas, kompetensi akademis yang tinggi, cerdas, tanggap lingkungan dan memiliki skill yang tinggi, sehingga mampu hidup bersaing ditengah masyarakat dengan baik.

Misi 2 : **Mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu.**

Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja lebih menekankan pada penerapan sistem anggaran berencana dan berprogram, yaitu lebih memprioritaskan arah anggaran yang biasanya disusun berdasarkan lembaga dan pemasukan menjadi anggaran berbasis pelaksanaan. Hal ini juga berarti menerapkan sistem penyusunan anggaran yang menekankan pada program dan kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian akan memudahkan untuk menganalisis rencana alternatif bagi pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan/direncanakan. Anggaran berbasis kinerja berarti prestasi kerja apa yang harus dicapai oleh pengelola anggaran keuangan daerah selama periode tertentu yang berlandaskan pada program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan negara adalah tingkat efisiensi dan efektivitas dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan kegiatan masing-masing program dan kegiatannya bagi suatu instansi pemerintah. Oleh karena itu diharapkan mempunyai kemampuan teknis secara efisien dan efektif dengan wawasan yang komprehensif dan proporsional.

**Misi 3 : Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.**

Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan Daerah yang meliputi: (1) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan keuangan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, (2) pengeluaran daerah, (3) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. (4) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Pemanfaatan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif, asas manfaat, artinya pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan aset daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

**Misi 4 : Mewujudkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan terkendali secara berkelanjutan**

Kualitas laporan keuangan Pemerintahan Daerah yang baik (good governance) tidak hanya ditentukan oleh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan supremasi hukum. Laporan keuangan yang berbasis pada public mencakup kepentingan (1) Akuntabilitas internal yang berkepentingan seperti pegawai, pejabat pengelola keuangan negara, dan badan legislatif. (2) akuntabilitas eksternal adalah pertanggungjawaban

kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan, seperti pembayar pajak, media massa, pemberi dana bantuan, dan investor atau kreditor. Sistem laporan keuangan BPKAD harus berdasarkan 5 elemen yakni ekonomis, efisiensi dan efektivitas serta keadilan (equity) dan pemerataan atau kesetaraan (equity).

## **2.2 Tujuan**

- 1 Mewujudkan Aparatur Pengelola Keuangan dan Aset yang berkualitas, berintegritas, berdedikasi tinggi, bertanggungjawab dan memiliki wawasan serta keterampilan yang memadai.
- 2 Mewujudkan Sistem pengelolaan keuangan yang Transparan dan Akuntabel.
- 3 Mewujudkan pengelolaan Aset yang profesional dan Akuntabel

## **2.3 Sasaran**

1. Meningkatkan SDM Aparatur BPKAD yang berkualitas, berintegritas, Bertanggung jawab dan memiliki wawasan serta keterampilan dalam pelaksanaan TUPOKSI yang sesuai dengan tuntutan Peraturan yang berlaku;
2. Meningkatnya Pengelolaan Anggaran secara efektif dan efisien serta Tepat waktu, tepat sasaran sesuai ketentuan berlaku;
3. Diperolehnya Data Aset yang akurat dan dikelola dengan Administrasi yang benar

## **2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Untuk melaksanakan Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis 2017-2022, BPKAD menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sebagai dasar menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar sebagai berikut :

**Tabel 1:  
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**

<b>N O</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>		<b>KETERANGAN</b>	
1	Meningkatkan SDM Aparatur BPKAD yang berkualitas, berintegritas, Bertanggung jawab dan memiliki wawasan serta keterampilan dalam pelaksanaan TUPOKSI yang sesuai dengan tuntutan Peraturan yang berlaku;	1	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek, diklat dan pelatihan lainnya.	1	Jumlah Peserta yang dilatih di BPKAD Setiap Tahun
		2	Porsentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien	2	Formulasi Perhitungan : Total kebutuhan/ Realisasi x 100%
2	Meningkatnya Pengelolaan Anggaran secara efektif dan efisien serta Tepat waktu, tepat sasaran sesuai ketentuan berlaku	1	PERDA APBD Tepat Waktu	1	Tanggal penetapan APBD
		2	PERBUP APBD Tepat Waktu	2	Tanggal Penetapan PERBUP APBD
		3	Akurasi Data Kas Daerah	3	Akuasi data Kas Daerah per 31 Desember
		4	LPP APBD tepat Waktu	4	Tanggal Penyampaian LPP APBD
		5	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	5	WTP, WDP atau Disclaimer
3	Diperolehnya Data Aset yang akurat dan dikelola dengan Administrasi yang benar	1	Data Aset daerah yang dapat diinventarisasi	1	Data Inventarisasi Aset
		2	Data BMD yang diverifikasi dan divalidasi	2	Data BMD dari seluruh SKPD
		3	Data Aset yang Dihapus	3	Data Usulan penghapusan Aset Daerah dari SKPD
		4	Data Aset yang di lelang	5	Data Usulan Aset yang akan dilelang oleh SKPD

## 2.5 Kebijakan, Program dan Sasaran

### Kebijakan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar selanjutnya menetapkan arah kebijakan yang merupakan sinergi dari Lingkungan Startegis dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan dalam Critical Sucses Faktor (CFS) sebagai modal awal untuk mengurai permasalahan yang kompleks.

Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:

1. Koordinasi Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan prima bidang pengelolaan administrasi perkantoran;
3. Memenuhi kebutuhan sarana parasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran;
4. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan akuntabel yang tersaji dalam suatu proses manajemen sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran;

## 2.6 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

**Tabel 2 :**  
**RENCANA KERJA TAHUNAN 2018**

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
Meningkatkan SDM Aparatur BPKAD yang berkualitas, berintegritas, Bertanggung jawab dan memiliki wawasan serta keterampilan dalam pelaksanaan TUPOKSI yang sesuai dengan tuntutan Peraturan yang berlaku;	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100	%
	Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan Listrik	Lancarnya komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100	%
	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%
	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%

	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%
	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%
	Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%
	Penyediaan Jasa tenaga harian lepas	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%
Meningkatkan SDM Aparatur BPKAD yang berkualitas, berintegritas, Bertanggung jawab dan memiliki wawasan serta keterampilan dalam pelaksanaan TUPOKSI yang sesuai dengan tuntutan Peraturan yang berlaku;	<b>Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Prosentase Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	100	%
	Pengadaan komputer PC/notebook dan kelengkapannya	Prosentase Pengadaa Komputer PC/Notebook dan Kelengkapannya	100	%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur	100	%
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur	6	Unit
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Prosentase Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1	tahun
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			
	Bimbingan Teknis Implementasi SIPKD Modul Aset	Prosentase PNS OPD yang terlayani untuk ikut pendidikan dan Pelatihan	52	OPD
	Bimbingan Teknis Akuntansi AKRUAL berbasis Aplikasi SIPKD	Prosentase PNS OPD yang terlayani untuk ikut pendidikan dan Pelatihan	52	OPD

Meningkatnya Pengelolaan Anggaran secara efektif dan efisien serta Tepat waktu, tepat sasaran sesuai ketentuanberlaku	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%
	Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Enam bulan Berikutnya	Prosentase terlaksananya Pelaporan Semesteran dan Prognosis Enam bulan Berikutnya	100	%
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			
	Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Prosentase Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah		
	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan APBD	Prosentase Jumlah PNS yang terlayani untuk mengikuti Sosialisasi		
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			
Meningkatnya Pengelolaan Anggaran secara efektif dan efisien serta Tepat waktu, tepat sasaran sesuai ketentuanberlaku	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Penyampaian PERDA APBD yang tepat Waktu	100	%
	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Penyampaian PERDA APBD- perubahan yang tepat Waktu	100	%
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Keberadaan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100	%
	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Lancarnya Penata usahaan Pengelolaan keuangan dengan SIPKD	100	%
Diperolehnya Data Aset yang akurat dan dikelola dengan Administrasi yang benar	Penghapusan Aset	Terhapusnya Aset Barang Milik Daerah di setiap SKPD	100	%



## 2.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

**Tabel 3:**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatkan SDM Aparatur BPKAD yang berkualitas, berintegritas, Bertanggung jawab dan memiliki wawasan serta keterampilan dalam pelaksanaan TUPOKSI yang sesuai dengan tuntutan Peraturan yang berlaku;			<b>01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp 2.289.479.753</b>
	Tersedianya belanja listrik, komunikasi dan air	1 thn	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 151.000.000
	Tersedianya belanja kebersihan kantor	1 thn	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 196957.840
	Persentase Berfungsinya Peralatan Kerja Kantor	1 thn	09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp 56.000.000
	Tersedianya alat tulis kantor	1 thn	10 Penyediaan alat tulis kantor	Rp 198.888.613
	Tersedianya barang cetakan	1 thn	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 176.100.800
	Persentase Peralatan dan perlengkapan Kantor Terpenuhi	1 thn	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 144.100.000
	Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan	1 thn	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 9.282.500
	Tersedianya makan dan minum kantor	1 thn	17 Penyediaan makanan dan minuman	Rp 149.550.000
	Terselenggaranya rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	1 thn	18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 898.600.000
	Jumlah Tenaga Harian lepas yang mendukung kelancaran Perkantoran	1 thn	19 Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Rp 309,000,000
	1 thn	<b>02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Rp 865.072.800</b>	
Tersedianya Komputer PC/Notebook	1 thn	13 Pengadaan Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya	Rp 201.445.000	
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 thn	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 493.079.000	

	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	6 Unit	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Rp 154.948.800
			17	Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset	Rp 15.600.000
			<b>04</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Rp 94.581.500</b>
Meningkatnya Pengelolaan Anggaran secara efektif dan efisien serta Tepat waktu, tepat sasaran sesuai ketentuan berlaku	Tersusunnya LKJIP OPD	1 lap	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 3.532.000
	Laporan keuangan akhir tahun OPD BPKAD	1 lap	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp 4.657.000
	Tersusunnya laporan semesteran dan prognosis	1 lap	14	Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan berikutnya	Rp 86,392,500
			<b>17</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Rp 1.088.412.504</b>
	Prosentase Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah	25 Org	01	Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Rp 1.078.522.504
Meningkatkan SDM Aparatur Pengelola Keuangan dan Aset yang berkualitas, berintegritas, Bertanggung jawab dan memiliki wawasan serta keterampilan dalam pelaksanaan TUPOKSI yang sesuai dengan tuntutan Peraturan yang berlaku;	Prosentase OPD yang mengikuti sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan APBD	52 OPD	02	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan APBD	Rp 89.190.000
			<b>06</b>	<b>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Rp 3.061.075.125</b>
Meningkatnya Pengelolaan Anggaran secara efektif dan efisien serta Tepat waktu, tepat sasaran sesuai ketentuan berlaku	Tersusunnya Rancangan peraturan Perda APBD dan Peraturan Perda APBD	80 Set	6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Rp 391.827.000
	Tersusunnya Rancangan peraturan Perda APBD Perubahan dan Peraturan Perda APBD Perubahan	80 Set	8	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Rp 392.227.000

Meningkatnya Pengelolaan Anggaran secara efektif dan efisien serta Tepat waktu, tepat sasaran sesuai ketentuan berlaku	Keberadaan Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD	1 lap	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rp 330.435.500
	Optimalisasi penggunaan SIPKD	Thn 2018	13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Rp 582.330.875
	Data Kas Daerah yang akurat	Thn 2018	46	Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Kas Daerah	Rp 219.800.000
	Data Barang Milik Daerah yang akan divalidasi	100 %	59	Verifikasi dan Validasi Barng Milik Daerah	Rp 915.964.750
	Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Kampar yang akan dihapus		65	Penghapusan Aset	Rp 59.090.000
	Keberadaan Sistem Informasi Gaji	Thn 2018	91	Penyusunan Sistem Informasi Gaji	Rp 51.100.000
		100 %	92	Kapitalisasi Barang Milik Daerah	Rp 181.300.000

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Rp 2.289.479.753,00 |
| 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Rp 865.072.800,00   |
| 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp 94.581.500,00    |
| 4. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      | Rp 1.088.412.504,00 |
| 5. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah               | Rp 3.061.075.125,00 |

**Jumlah Anggaran Rp. 7.477.921.682**



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

**3.1 Pengukuran Kinerja**

Dalam mengukur Capaian Indikator Kinerja BPKAD Tahun 2018 didasarkan kepada ketentuan sebagai berikut:

1. Angka Maksimum Capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%
2. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indicator kinerja adalah:

$$\text{Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

**3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis. Indikator Kinerja Utama SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar

**Tabel 4:**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	Prosentase Kesesuaian Kegiatan dengan Perencanaan	Jumlah Kegiatan dipencanaan dan di Penganggaran
<b>2</b>	Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan sesuai Target	Formulasi Perhitungan : Total kebutuhan /Realisasi x 100%
<b>3</b>	Prosentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	Tanggal penetapan APBD
<b>4</b>	PERBUP APBD Tepat Waktu	Tanggal Penetapan PERBUP APBD
<b>5</b>	Prosentase Data Aset Yang Akurat	Data Aset yang sudah diverifikasi dan divalidasi
<b>6</b>	LPP APBD tepat Waktu	Tanggal Penyampaian LPP APBD
<b>7</b>	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP, WDP atau Disclaimer
<b>8</b>	Data Aset daerah yang diverifikasi dan divalidasi	Data Aset yang sudah diverifikasi dan divalidasi
<b>9</b>	Data Tanah, Bangunan/Gedung dan Kendaraan Dinas Daerah	Data Tanah, Bangunan/Gedung dan Kendaraan Dinas Daerah dari seluruh SKPD
<b>10</b>	Data Aset yang Dihapus	Data Usulan penghapusan Aset Daerah dari SKPD
<b>11</b>	Data Aset yang di lelang	Data Usulan Aset yang akan dilelang oleh SKPD

### 3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

#### 3.3.1 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2018 Menurut Sasaran Strategis

1. *Sasaran Strategis 1: Meningkatkan SDM Aparatur BPKAD yang berkualitas, berintegritas, Bertanggung jawab dan memiliki wawasan serta keterampilan dalam pelaksanaan TUPOKSI yang sesuai dengan tuntutan Peraturan yang berlaku*, Diukur dengan 2 indikator Utama yaitu:

**Tabel 5 :**  
**Perbandingan Capaian IKU 1 Tahun 2017**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek, diklat dan pelatihan lainnya.	Orang	20	20	100
% peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien	%	100	100	100

**Capaian IKU 1 Tahun 2018**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek, diklat dan pelatihan lainnya.	Orang	3	3	100
% peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien	%	100	100	100

Untuk Indikator Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek, diklat dan pelatihan lainnya, yaitu dengan membandingkan Jumlah Peserta Bimtek atau pelatihan pada Bidang Akuntansi dan Bidang Aset yang di targetkan pada DPA/DPPA BPKAD 2018 Dengan Jumlah realisasi Peserta yang mengikuti.

**Tabel 6:**  
**Perbandingan Jumlah Target dan Realisasi Peserta Pelatihan dan BIMTEK 2017**

NO	NAMA PELATIHAN, BIMTEK	SPESIFIKASI PESERTA	JUMLAH TARGET PESERTA	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI
1	Bimbingan Teknis Implementasi SIPKD Modul Aset	Staf Bidang Pengelolaan Aset	10	10
2	Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	Staf Bidang Pengelolaan Aset (Pengurus Barang)	1	1
3	Bimbingan Teknis Akuntansi Berbasis Akrua	Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan	9	9
<b>JUMLAH PESERTA YANG DILATIH</b>			<b>20</b>	<b>20</b>

**Jumlah Target dan Realisasi Peserta Pelatihan dan BIMTEK 2018**

NO	NAMA PELATIHAN, BIMTEK	SPESIFIKASI PESERTA	JUMLAH TARGET PESERTA	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI
1	Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset	PPK-SKPD, Pengurus Barang, Bendahara	3	3
<b>JUMLAH PESERTA YANG DILATIH</b>			<b>3</b>	<b>3</b>

Untuk Indikator peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien yaitu dengan membandingkan Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang di butuhkan di DPA/DPPA BPKAD 2018 dengan Realisasinya per Desember 2018.

**2. Sasaran Strategis 2: Mewujudkan Sistem pengelolaan keuangan yang Transparan dan Akuntabel;**

**Tabel 7:**  
**Perbandingan Capaian IKU 2 Tahun 2017**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
<b>PERDA APBD Tepat Waktu</b>	-	100%	100%	100%

<b>PERBUP APBD Tepat Waktu</b>	-	100%	100%	100%
<b>Akurasi Data Kas Daerah</b>	-	100%	100%	100%
<b>LPP APBD tepat Waktu</b>	-	100%	100%	100%
<b>Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah</b>	-	WTP	WTP	100%

**Capaian IKU 2 Tahun 2018**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>PERDA APBD Tepat Waktu</b>	-	100%	100%	100%
<b>PERBUP APBD Tepat Waktu</b>	-	100%	100%	100%
<b>Akurasi Data Kas Daerah</b>	-	100%	100%	100%
<b>LPP APBD tepat Waktu</b>	-	100%	100%	100%
<b>Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah</b>	-	WTP	WTP	100%

Pada sasaran strategis 3 diukur dengan 5 Indikator Utama, yaitu ketepatan PERDA APBD disahkan, PERBUP APBD yang disahkan, Akurasi data Kas Daerah per 31 Desember setiap tahun Anggaran, Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu serta OPINI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Kampar.

**3. Sasaran Strategis 3 : Diperolehnya Data Aset yang akurat dan dikelola dengan Administrasi yang benar**

**Tabel 8:  
Perbandingan Capaian IKU 3 Tahun 2017**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Data Aset daerah yang diverifikasi dan divalidasi</b>	-	100%	100%	100%
<b>Data Tanah, Bangunan /Gedung dan Kendaraan Dinas Daerah</b>	-	100%	100%	100%
<b>Data Aset yang Dihapus</b>	-	-	-	-
<b>Data Aset yang di lelang</b>	-	100%	100%	100%

**Tabel 9:**  
**Capaian IKU 3 Tahun 2018**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Data Aset daerah yang diverifikasi dan divalidasi</b>	-	100%	100%	100%
<b>Data Tanah, Bangunan /Gedung dan Kendaraan Dinas Daerah</b>	-	100%	100%	100%
<b>Data Aset yang Dihapus</b>	-	-	-	-
<b>Data Aset yang di lelang</b>	-	100%	100%	100%

Strategi 3 diukur dengan 4 Indikator Utama seperti pada Tabel diatas, pada data tersebut dapat dilihat 3 Indikator Utama yang dapat terpenuhi pada tahun 2017 ini, Khusus untuk Indikator ketiga (Data Aset yang dihapus), Direncanakan Indikator Utama ini ingin dicapai pada Tahun 2017 ini, yaitu pada kegiatan Penghapusan Aset, Namun tidak dapat dilaksanakan karena dimasukkan kedalam rincian RKPA/DPPA Kegiatan Lelang Barang Milik Daerah BPKAD Kabupaten Kampar.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

### **Analisis Capaian Keuangan**

Pagu dan realisasi anggaran belanja langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 10:**  
**Pagu dan Realisasi Keuangan Belanja Langsung T.A 2018**

<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.289.479.753,00</b>	<b>1.891.305.099,00</b>	<b>93.05</b>
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	151.000.000,00	100.197.915,00	66,36
Penyediaan Jasa kebersihan kantor	196.957.840,00	152.749.846,00	77,55
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	56.000.000,00	55.450.000,00	99,02
Penyediaan alat tulis kantor	198.888.613,00	198.006.782,00	99,56
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	176.100.800,00	171.746.500,00	97,53

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.100.000,00	135.053.765,00	93,72
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	9.282.500,00	9.120.000,00	98,25
Penyediaan makanan dan minuman	149.550.000,00	149.410.000,00	99,91
Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	898.600.000,00	672.473.791,00	74,84
Penyediaan Jasa tenaga harian lepas	309.000.000,00	247.096.500,00	79,97
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>849.472.800,00</b>	<b>827.672.498,00</b>	<b>92.71</b>
Pengadaan Komputer PC/Notebook dan Kelengkapannya	201.445.000,00	193.753.500,00	96,18
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	493.079.000,00	491.125.000,00	99,60
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	154.948.800,00	142.793.998,00	92,16
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>99.37</b>
Bimbingan Teknis Penatausahaan Penatausahaan Keuangan dan Aset	15.600.000,00	15.600.000,00	98,92
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>94.581.500,00</b>	<b>86.511.683,000</b>	<b>33.33</b>
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.532.000,00	3.532.000,00	100,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.657.000,00	4.657.000,00	100,00
Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan berikutnya	86.392.500,00	78.322.683,00	90,66
<b>Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>1.167.712.504,00</b>	<b>1.150.757.824,00</b>	<b>83.46</b>
Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	1.078.522.504,00	1.067.722.504,00	99,00
Sosialisasi Peraturan Menteri dalam negeri tentang penyusunan APBD	89.190.000,00	83.035.320,00	93,10
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>3.061.075.125,00</b>	<b>2.916.297.615,00</b>	<b>83.46</b>
Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	391.827.000,00	360.390.000,00	91,98

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	392.227.000,00	378.825.500, 00	96,58
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	330.435.500,00	319.329.205,00	96,03
Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	582.330.875,00	557.338.265,00	95,71
Peningkatan kapasitas dan Kinerja Kas daerah	219.800.000,00	181.201.378,00	82,44
Verifikasi dan Validasi Barang Milik Daerah	915.964.750,00	895.683.267,00	97,79
Penghapusan Aset	59.090.000,00	59.090.000,00	100,00
Penyusunan Sistem Informasi Gaji	51.100.000,00	47.900.000,00	90,02
Kapitalisasi Barang Milik Daerah	118,300.000,00	116.540.000,00	98,51
<b>Total</b>	<b>7.477.921.682,00</b>	<b>6.883.772.499,00</b>	<b>92,05</b>

Pada tahun anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar mendapatkan alokasi dana APBD sebagai berikut :

**Belanja Tidak Langsung**

Pagu Anggaran : Rp. 10.129.993.774,00

Realisasi : Rp. 9.064.856.607,00

**Belanja Langsung**

Pagu Anggaran : Rp. 7.477.921.682,00

Realisasi : Rp. 6.893.772.499,00

Terkait dengan pengukuran Kinerja, kegiatan strategis yang dilaksanakan dengan dana APBD pada tahun 2018 sebanyak 34 kegiatan yang tercakup dalam 6 Program.

Dalam bagian evaluasi akuntabilitas anggaran ini akan disampaikan hasil analisis akuntabilitas anggaran tahun 2018, yang mengalami perubahan anggaran pada rekening belanja langsung. Sebelum perubahan sebesar **Rp. 6.946.402.193,00** dan sesudah perubahan menjadi **Rp. 7.477.921.682,00** dengan perubahan bertambah sebesar **Rp. 531.519.489,00** atau sebesar 7,7% dengan perincian :

**Tabel 11:**  
**Perubahan Anggaran dari APBD Murni dan APBD Perubahan T. A 2018**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>MURNI</b>	<b>PERUBAHAN</b>	<b>BERTAMBAH/ BERKURANG</b>
<b>1</b>	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.148.540.289,00	2.289.479.753,00	140.939.464,00
<b>2</b>	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	622.613.000,00	849.472.800,00	226.859.800,00
<b>3</b>	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	15.600.000,00	15.600.000,00
<b>4</b>	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	101.181.500,00	94.581.500,00	(6.600.000,00)
<b>5</b>	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	1.088.412.504,00	1.167.712.504,00	79.300.000,00
<b>6</b>	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2.985.654.900,00	3.061.075.125	75.420.225,00
<b>JUMLAH</b>		<b>8.946.402.193,00</b>	<b>7.477.921.682,00</b>	<b>531.519.489,00</b>

Dari Anggaran yang tersedia, ada beberapa kegiatan yang keuangannya terealisasi dibawah 90%, berikut penjelasannya :

**Tabel 12:**  
**Program dan Kegiatan Realisasi Keuangan dibawah 90%**

PROGRAM/ KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 151.000.000	Rp 100.197.915	66,36	Anggaran digunakan sesuai kebutuhan
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 196.957.840	Rp 152.749.846	77,55	Anggaran digunakan sesuai kebutuhan
18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Rp 898.600.000	Rp 672.473.791	74,84	Anggaran digunakan sesuai kebutuhan
19	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Rp 309.000.000	Rp 247.096.500	79,97	Anggaran digunakan sesuai kebutuhan
<b>07</b>	<b>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>				
46	Peningkatan kapasitas dan kinerja kas Daerah	Rp 219.800.000	Rp 181.201.378	82,44	Fisik sudah terlaksana 100% keuangan hanya 82.44% karena efisiensi anggaran.

Dari beberapa hal yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian realisasi keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2018 yang dibawah 90% disebabkan faktor eksternal seperti Sosialisasi terhadap PPK-SKPD dan Pengurus Barang Pengguna dilaksanakan pada lokasi yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan, penggunaan Anggaran sesuai kebutuhan serta efisiensi anggaran.

Berdasarkan hasil analisis dengan cara membandingkan dokumen-dokumen tersebut diatas secara kualitatif, diperoleh kesimpulan bahwa penyusunan program-program yang terkait, sudah tepat dan semuanya sudah sesuai dan selaras dengan sasaran strategis yang ingin dicapai.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2018.

Pelaksanaan kegiatan biaya APBD tahun 2018 dapat dikatakan berhasil, hal ini terlihat pada rata-rata presentase pencapaian rencana tingkat capaian seluruh kegiatan yang mencapai **92.05 %**. Namun demikian masih dihadapkan dengan berbagai hambatan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja instansi.

Guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, pada tahun 2018 ditempuh upaya-upaya sebagai berikut :

1. Membangun Program dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan pengelolaan keuangan sebagai penunjang bagi Pelaksanaan Pengelolaan keuangan dan Aset yang Akuntabel dan tepat sasaran ;
2. Memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan administrasi aset sebagai penunjang tupoksi SKPD;
3. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah;
4. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
5. Peningkatan professionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.

Berdasarkan sasaran yang ditetapkan, sesuai dengan visi, misi dan tujuan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran, maka pencapaian akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar tahun 2018 sebesar **92.05 %**.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar ini disajikan, semoga dapat menjadi bahan evaluasi, penilaian serta referensi bagi peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar di masa yang akan datang.

Bangkinang,      Februari 2019



**BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR**

**EDWARD, S.E. M.M.**

**Pembina**

**NIP. 19740326 20003 1 003**

**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**LkjIP T.A 2018**